



Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta selawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini dengan judul **“YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982”** dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua Drs.Irza Raferdi,MM & Nelmida Efiarni, S.Pd., kakak Dian Eka Pratiwi,Amd.Keb & Erix Amri,Amd.Rad., dan seluruh keluarga besar Bareno dan Nazir yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan program sarjana ini. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada Komisi Pembimbing yakni Bapak Sukanda Husin, S.H.,LL.M, dan Ibu Magdariza,S.H.,M.H. atas bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini. Selain itu tidak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof.Dr. Yuliandri, SH,MH.
2. Ketua Program Studi Hukum Reguler Mandiri Bapak Apriwal Gusti,SH.

3. Sekretaris Program Studi Hukum Reguler Mandiri Ibu Arfiani,SH,MH.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas sumbangsih ilmu yang sangat berguna bagi Penulis.
5. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas terima kasih atas bantuannya kepada Penulis selama perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini.
6. Ady Zulkifli Amin yang telah memberikan dukungan moril dan materil sampai selesainya penulisan skripsi ini.
7. Semua sahabat di lingkungan kampus Universitas Andalas, Teman-teman Fakultas Hukum dan para senior tentunya (bg.Bona, Kak Iwid,dkk) terima kasih atas bantuan, inspirasi dan bimbingannya selama ini, terima kasih juga kepada Denisy, Era dan Shinta yang selalu setia membantu dan berbagai kemudahan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, sebagai manusia yang selalu mempunyai kekurangan, Penulis haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Semoga semua itu mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Padang, 11 Juni 2012

Penulis,

**Dian Khoreanita Pratiwi**  
**0810113266**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1          |
| B. Perumusan Masalah.....  | 6          |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6          |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 7          |
| E. Metode Penelitian.....  | 7          |
| F. Sistematika Penulisan.....  | 8          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI YURISDIKSI NEGARA DAN PEROMPIKAN KAPAL MV.SINAR KUDUS</b>   |            |
| A. Tinjauan Umum Yurisdiksi Negara.....  |            |
| 1. Pengertian dan Prinsip Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional...11   |            |
| 2. Pengertian Perompakan.....  | 25         |
| B. Tinjauan Umum Perompakan Kapal Mv.Sinar Kudus .....   | 29         |
| <b>BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN</b>   |            |
| A. Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV. Sinar Kudus yang Disandera Perompak di Laut Lepas.....                                 | 34         |
| B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV.Sinar Kudus yang Disandera Oleh Perompak Somalia..... | 43         |

#### **BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran.....      | 52 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR  
KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS  
DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

(Dian Khoreanita Pratiwi, 0810113266, 52 Halaman, Hukum Internasional,  
Universitas Andalas, Padang, 2012)

**ABSTRAK**

Perompakan merupakan kejahatan yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan bagi seluruh umat manusia. Perairan Somalia merupakan daerah rawan perompakan sejak terjadinya perang saudara pada tahun 1991. Banyak kasus perompakan yang terjadi di perairan Somalia diselesaikan dengan menuruti kemauan perompak, contohnya adalah kasus perompakan yang dialami oleh kapal MV.Sinar Kudus yang berbendera Indonesia, kasus ini diselesaikan dengan membayar uang tebusan sebagaimana yang diminta oleh para perompak. Dalam hukum internasional dikenal prinsip nasionalitas pasif, Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah negara memiliki yurisdiksi ketika salah satu dari warga negaranya dirugikan, bahkan jika kerusakan itu terjadi di negara lain, dan juga dikenal prinsip universal dimana setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional (perompakan) dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku dan korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia di laut lepas. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian memaparkan bahwa yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV.Sinar kudus adalah yurisdiksi nasionalitas pasif. Kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV.Sinar kudus yang disandera perompak Somalia yaitu kapal MV.Sinar kudus tidak didampingi oleh kapal perang Indonesia, sehingga Angkatan Laut Indonesia tidak dapat langsung menyerang perompak. Lemahnya penegakan hukum di Somalia menyulitkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pembebasan para awak kapal Sinar kudus yang disandera oleh perompak Somalia. Saran dari penelitian ini adalah dalam melakukan pelayaran ke perairan internasional terlebih melewati daerah rawan perompakan, kapal swasta yang berbendera Indonesia sebaiknya didampingi oleh kapal TNI AL atau kapal perang Indonesia berpatroli di lepas pantai Somalia dan daerah lain yang merupakan daerah rawan perompakan. Indonesia sebaiknya juga menggerakkan pasukan militer untuk berjaga-jaga pada saat negosiasi dilakukan, agar dalam negosiasi tersebut Indonesia tidak dipermainkan dengan lamanya proses negosiasi. Indonesia sebaiknya memberikan pelatihan khusus kepada taruna-tarunanya agar siap melakukan pelayaran dalam berbagai macam kondisi, dilanjutkan oleh perusahaan pelayaran yang memberikan bekal keselamatan yang sesuai standar pelayaran internasional.

**YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR  
KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS  
DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

(Dian Khoreanita Pratiwi, 0810113266, 52 Halaman, Hukum Internasional,  
Universitas Andalas, Padang, 2012)

**ABSTRAK**

Piracy is a crime that is recognized by the international community as a crime for all mankind. Coast of Somalia is prone to piracy since the civil war in 1991. Many cases of piracy occurring off the coast of Somalia are resolved by complying with the pirates' demand, the case of piracy experienced by MV.Sinar Kudus. The case was settled by paying the ransom as demanded by the pirates. In international law it is recognized as passive nationality principle in international law, This principle holds that a state has jurisdiction when one of its own citizens or nationals is harmed, even if that harm happens in another country, and also known as a universal principle in which each state has jurisdiction to prosecute perpetrators of international crimes (piracy) regardless of the nationality of the perpetrator and victim. Problems in this study are how the Indonesia's jurisdiction over MV. Sinar Kudus ship held hostage by Somali pirates on the high seas, and what are the obstacles in the implementation of Indonesia jurisdiction over the MV.Sinar Kudus ship held hostage by Somali pirates. The study was completed by using a normative juridical legal research method. The study finds out that the jurisdiction of Indonesia over the MV.Sinar Kudus ship is passive nationality jurisdiction. Obstacles in the implementation of Indonesia jurisdiction over MV.Sinar Kudus ship held hostage by Somali pirates MV.Sinar Kudus ship was not accompanied by warships of Indonesia, so that Indonesian Navy could not directly attack the pirates. The weak law enforcement in Somalia rendered Indonesia hard to cooperate in the release of MV.Sinar Kudus and its crews. The study suggests that in sailing on international waters especially passing the piracy-prone areas, private ship with Indonesian flag should be accompanied by a Navy ship or Indonesian warships patrolling off the coast of Somalia and other areas that are prone piracy. Indonesia should also mobilize military forces to keep watching at the time of negotiations carried out, so that in the negotiations Indonesia is not being played by the length of the negotiation process. Indonesia should provide specific training to the their midshipmen to be ready to sail in various conditions, followed by a shipping company that delivers the appropriate provision of the safety of international shipping standards.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR**  
**KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS**  
**DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

**A. Latar Belakang**

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya<sup>1</sup>. Jawahir Thontowi dan Prannoto Iskandar dalam bukunya menyatakan bahwa pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara, laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara.<sup>2</sup> Rezim yang melekat ini menjadikan laut lepas dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh negara manapun. Prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan.

Berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara baik negara berpantai atau tidak, dapat menggunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya.

---

<sup>1</sup> R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law Of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1983, hlm 204.

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 189.



Menurut Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan tersebut meliputi :

- a) *freedom of navigation;*
- b) *freedom of overflight;*
- c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;*
- d) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;*
- e) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*
- f) *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.*

kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) dalam pasal ini yakni setiap negara baik berpantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas, hal ini merupakan perwujudan dari hak berlayar sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 90 UNCLOS yaitu : “*every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas*”, kebebasan melakukan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi, setiap negara juga memiliki kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan melakukan riset ilmiah.

Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan hak-hak kebebasan di laut lepas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lain dalam Hukum Internasional. Laut lepas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS merupakan laut yang terbuka bagi semua negara, sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana pada kawasan tersebut, seperti pembajakan kapal, perdagangan gelap dan penyiaran yang tidak sah. Dalam hal ini

setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama di laut manapun di luar yurisdiksi suatu negara termasuk di laut lepas dalam pemberantasan pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis, serta siaran gelap.<sup>3</sup>

Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*).<sup>4</sup> Kejahatan internasional adalah perbuatan yang merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum internasional. Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” Romli Atmasasmita menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

“*international crimes* adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme.”

Pada pertemuan internasional *ARF Expert Group Meeting On Transnational Crime* yang diselenggarakan di Seoul tanggal 30-31 Oktober 2000 membahas permasalahan tentang pembajakan, migrasi ilegal dan perdagangan gelap senjata kecil dan ringan, dimana hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa pembajakan yang semakin meningkat, merupakan suatu kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan regional.<sup>6</sup> Keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu

---

<sup>3</sup> Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya, 2011, hlm 72.

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm 331.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004, hlm 9.

<sup>6</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 104.

diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang kongkret dalam memberantasi pembajakan (*piracy*). Prinsip pemberantasan perompakan ini juga ditegaskan oleh pasal 100 Konvensi yang meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Dengan demikian peranan negara semakin penting. Peranan yang begitu penting tersebut memerlukan aturan dan mekanisme yang baik seperti yurisdiksi menetapkan norma (*jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (*jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi mengadili (*jurisdiction to adjudicate*). Untuk itu, setiap negara harus menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memberantas tindakan perompakan, disinilah pentingnya suatu hubungan internasional. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa salah satu karakteristik negara adalah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacitiy to enter into relations with other states*)<sup>7</sup> kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yuridis baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

Berkembangnya hubungan antar negara yang semakin luas (global), menempatkan hukum internasional semakin berperan penting. Karena itu adanya kesepakatan internasional akan menjadi salah satu faktor penting di dalam mengatur lebih luas tentang kewenangan (hak), kewajiban dan tanggung jawab setiap negara,

---

<sup>7</sup> Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 103.

termasuk yang terkait dengan yurisdiksi, karena masalah yurisdiksi bukanlah hanya masalah dalam negeri saja.

Kewenangan negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keamanan pelayaran di laut lepas. Jadi kapal-kapal di laut lepas harus mempunyai ikatan hukum dengan negara benderanya agar negara tersebut melalui organ-organ dan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat mengawasi kapal-kapal tersebut. Namun pada kenyataannya banyak negara yang belum menjalankan yurisdiksinya dengan semaksimal mungkin, kapal-kapal berbendera jarang sekali diawasi oleh negara benderanya, hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kasus perompakan terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang merupakan kapal berbendera Indonesia.

Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirompak oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas perairan Somalia.<sup>8</sup> Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat dicegah atau bahkan diberantas dengan kerjasama dari setiap negara.

---

<sup>8</sup> Website Kompas : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 29 Oktober 2011.

Banyaknya kasus perompakan di laut lepas yang diselesaikan dengan menuruti kemauan perompak, hal ini hanya membuat perompakan semakin merajalela, pada kenyataannya negara-negara yang dirugikan dapat menjalankan yurisdiksi mengadilinya (*jurisdiction to adjudicate*) melalui kapal perang yang mempunyai wewenang untuk memberantas perompakan, yaitu kapal perang dapat menahan dan menangkap kapal-kapal bajak laut, selanjutnya negara bendera kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap<sup>9</sup>. Maka dari itu penulis mengangkat judul : **YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV . SINAR KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK DI LAUT LEPAS DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia di laut lepas?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.330-331.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia di laut lepas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

##### **A. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang yurisdiksi negara terhadap kapal benderanya yang disandera perompak di laut internasional.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa.

##### **B. Manfaat Praktis**

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam pembuatan karya-karya ilmiah dan merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang pernah penulis dapatkan selama duduk dibangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>10</sup> Penelitian yuridis normatif ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>11</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan pada :

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, antara lain :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain : berupa buku-buku, makalah, laporan, artikel koran dan website.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.41.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13-14.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Pengolahan dan Analisa Data

Untuk pengumpulan data diperlukan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul tidak menggunakan angka, tetapi analisis dilakukan dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum seperti : subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Kemudian dilakukan analisa terhadap kaedah-kaedah hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu :

- BAB I**           Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II**           Tinjauan umum, memaparkan tinjauan umum tentang yurisdiksi negara dalam hukum internasional, istilah, pengertian, prinsip-prinsip serta yurisdiksi negara di laut lepas dan status kapal dalam hukum internasional dan pengertian perompakan. Tinjauan umum mengenai kasus perompakan yang dialami oleh kapal MV.Sinar kudus di tinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982.
- BAB III**          Hasil penelitian dan pembahasan, memaparkan tentang yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia di laut lepas ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, serta kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia.
- BAB IV**          Penutup, memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.